

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menyediakan pelayanan publik maka pemerintah daerah melakukan suatu pengeluaran atau belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (sebelumnya Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi organisasi, sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi atau dikenal dengan biaya operasional organisasi yang ada pada pemerintah daerah. Dalam 2 jenis belanja tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu belanja langsung terdiri dari belanja pegawai (upah dan honor), belanja barang dan

jasa, dan belanja modal. Belanja tidak langsung terdiri belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dan belanja tidak terduga. Belanja daerah diutamakan untuk membiayai urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan.

Kebijakan desentralisasi merupakan suatu kebijakan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Implikasi dari desentralisasi dan pemberian otonomi yang luas menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik. Menurut Irwan (2009) pembangunan yang dilaksanakan akan banyak memberikan manfaat bagi daerah, diantaranya :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat
- b. Mendorong perkembangan perekonomian daerah
- c. Meningkatkan pendapatan asli daerah

Salah satu variabel yang dapat mempengaruhi belanja daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh prakosa (2004), Adi (2006) dan Tuasikal (2008) PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah untuk

mengoptimalkan PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut.

Selain variabel PAD, belanja daerah juga dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. PDRB merupakan neraca makro ekonomi yang dihitung secara konsisten dan terintegrasi atas dasar harga berlaku (dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga) maupun atas dasar harga konstan (tidak dipengaruhi oleh perubahan harga) dengan berdasarkan pada konsep, definisi, klasifikasi, dan cara perhitungan yang telah disepakati secara internasional. Semakin besar nilai PDRB menunjukkan semakin besar kekuatan ekonomi wilayah tersebut.

Selain PAD dan PDRB, belanja daerah juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Penduduk adalah warga negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap atau berniat menetap selama minimal 1 tahun. Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar, supaya kualitas pertumbuhan ekonomi lebih baik, pertumbuhan penduduk harus selalu dikendalikan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, PAD terdiri

dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD menunjukkan adanya peningkatan partisipasi publik terhadap jalannya pemerintahan di daerahnya. PEMDA yang salah satu tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan PAD sebagai bentuk kemandirian di era otonomi daerah. Selama ini PAD memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dengan memajukan perekonomian daerah. Bermula dari kemungkinan untuk mewujudkan harapan tersebut, PEMDA melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, yang salah satunya dilakukan dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal pun akan semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan PP No 58 Tahun 2005 tentang pengeluaran keuangan daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika PEMDA ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka PEMDA harus menggali sebesar- besarnya. Jumlah Penduduk adalah satu indikator penting dalam suatu Negara. Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak

penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka banyak yang harus dicanangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah.

Kabupaten Lembata merupakan salah 1 kabupaten dari 9 kabupaten di pulau Flores yang telah menerapkan sistem Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (sebelumnya Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Berikut data Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Penduduk dan Laporan Belanja tahun 2016-2020.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah,
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Lembata
Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)	Jumlah Penduduk
		Harga Berlaku	
2016	Rp 35.723.669.169,31	Rp 1465.33	134.573 Jiwa
2017	Rp 37.992.916.558,69	Rp 1586.16	137.714 Jiwa
2018	Rp 42.882.808.397,73	Rp 1724.74	140.390 Jiwa
2019	Rp 51.718.451.391,20	Rp 1856.81	143.074 Jiwa
2020	Rp 44.244.016.164,15	Rp 1853.92	145.685 Jiwa

Sumber data: *Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lembata Tahun 2022, Data Proyeksi, Tahun 2021*

Dari tabel 1.1 secara umum dapat dilihat bahwa total Pendapatan Asli Daerah, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pengeluaran dengan harga berlaku dari tahun ke tahun, dan jumlah penduduk Kabupaten Lembata mengalami fluktuasi (naik turun). Pada Tahun 2016 total pendapatan asli daerah sebesar Rp 35.723.669.169,31, total PDRB dengan harga berlaku sebesar Rp 1465.33 dan total jumlah penduduk sebanyak 134.573 Jiwa. Pada Tahun 2017 total pendapatan asli daerah sebesar Rp 37.992.916.558,69, total PDRB dengan harga berlaku sebesar Rp 1586.16 dan total jumlah penduduk sebanyak 137.714 Jiwa. Pada tahun 2018 total pendapatan asli daerah Rp 42.882.808.397,73, total PDRB dengan harga berlaku sebesar Rp 1724.74 dan total jumlah penduduk sebanyak 140.390 jiwa. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan total PAD sebesar Rp 51.718.451.391,20, total PDRB dengan harga berlaku sebesar Rp 1856.81 dan juga total jumlah penduduk sebanyak 143.074 jiwa. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan total PAD sebesar Rp 44.244.016.164,15, total PDRB dengan harga berlaku sebesar Rp 1.853.92, dan total jumlah penduduk mengalami kenaikan sebanyak 145.685 jiwa.

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Belanja
Kabupaten Lembata
Tahun 2016-2020

Tahun					
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Belanja	893.879.074.683	738.444.560.948,40	795.151.389.483,67	926.466.269.006,46	843.824.447.890,22
Belanja Operasi	536.804.863.344	469.900.282.314,40	475.524.539.774,00	524.115.646.806,37	487.908.188.218,05
Belanja Pegawai	315.830.666.695	270.815.850.237,00	273.020.103.669,00	288.666.075.940,00	285.106.829.493,00
Belanja Barang dan Jasa	200.752.127.894	173.718.018.259,40	198.312.336.105,00	232.461.730.866,37	200.497.771.545,05
Belanja Bunga	-		-	-	-
Belanja Hibah	19.824.568.800	16.098.913.818,00	3.965.600.000,00	2.113.340.000,00	1.997.212.180,00
Belanja Bantuan Sosial	397.500.000	265.500.000,00	226.500.000,00	874.500.000,00	306.375.000,00
Belanja Modal	217.144.966.890	113.059.810.243,00	160.628.410.138,67	214.079.867.468,09	160.535.891.652,17
Belanja Modal Tanah	220.000.000	245.000.000,00	-	1.712.616.400,00	972.440.522,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.715.233.910	10.894.675.858,00	34.791.164.690,00	34.477.355.589,68	39.474.987.343,05
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.078.508.374	28.493.668.680,00	43.883.857.446,67	77.043.763.824,47	62.257.464.388,12
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	178.678.756.344	71.177.054.705,00	68.444.775.039,00	86.671.490.751,16	40.787.866.548,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	452.468.262	2.249.411.00,00	13.508.612.963,00	14.174.640.902,78	17.043.132.851,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	500.000.000,00	108.497.788,00	234.161.701,00	12.511.101.004,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	500.000.000,00	108.497.788,00	234.161.701,00	12.511.101.004,00
Belanja Transfer	138.929.244.449	163.984.468.391,00	158.889.941.783,00	188.036.593.031,00	182.869.267.016,00
Belanja Bagi Hasil	-	4.105.594.843,00	1.632.261.383,00	2.137.928.456,00	2.647.596.966,00
Belanja Bantuan Keuangan	138.100.683.335	159.878.873.548,00	157.257.680.400,00	185.898.664.575,00	180.221.670.050,00

Sumber Data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lembata Tahun 2022

Berdasarkan data pada Tabel. 1.2, secara angka dapat dilihat bahwa belanja daerah lima tahun terakhir bersifat fluktuasi atau naik turun dimana pada tahun 2016 nilai belanja sebesar Rp. 893.879.074.683 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar Rp. 738.444.560.948,40 dan pada tahun 2018 nilai belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp.795.151.389.483,67, pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan sebesar Rp.926.466.269.006,46 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.843.824.447.890,22 yang disebabkan karena adanya dampak pandemi COVID-19.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur (2015) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dan secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Wia Rizqi Amalia, Wahyudin Nor dan M. Nordiansyah (2015) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah sedangkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja daerah dan hasil penelitian juga menunjukkan telah terjadi flypaper effect dikarenakan

nilai signifikansi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus lebih tinggi daripada nilai signifikansi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan secara parsial pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah dan secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap belanja daerah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Determinan Belanja Daerah Pada Kabupaten Lembata Tahun 2016-2020**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah ini adalah :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Lembata?
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Lembata?
3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah di Kabupaten Lembata?
4. Apakah PAD, PDRB, dan jumlah Penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten lembata ?

5. Bagaimana Perkembangan PAD, PDRB, dan jumlah Penduduk Kabupaten Lembata Terhadap Belanja Daerah ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap belanja daerah di Kabupaten Lembata
2. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto secara parsial terhadap belanja daerah di kabupaten Lembata
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk secara parsial terhadap belanja daerah di kabupaten Lembata
4. Untuk mengetahui tingkat PAD, PDRB, dan Jumlah Penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Lembata

1.4 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana analisis determinan belanja daerah pada Kabupaten Lembata sehingga dapat menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru bagi para pembaca.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian-penelitian selanjutnya sehingga mampu menghasilkan teori baru tentang determinan belanja daerah.